

DAMPAK INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA EKONOMI KOMODITAS PERKEBUNAN UTAMA PADA BERBAGAI REZIM NILAI TUKAR RUPIAH 1979-2005

Impact of Government Intervention on the Economic Performance of Main Estate Crops during Various Terms of Trade Regimes of 1979-2005

Bambang Dradjat

*Peneliti Utama Bidang Sosial Ekonomi pada Lembaga Riset Perkebunan Indonesia,
Jl. Salak No. 1A, Bogor, 16151*

ABSTRACT

This research was focussed on the effects of production, trade and macro economic policies on the real price, level of protection and the achievement of estate crop commodities, namely cocoa, coffee, rubber, tea and crude palm oil (CPO), in the Indonesian domestic market. The method of analyses used includes the decomposition of relative prices of estate crop commodities and direct, indirect and total protection rates. The results show that the real prices of main estate crops in the period of 1985-1997 experienced a decrease compared to that of 1979-1985. However, in the period of 1997-2005, the real prices of cocoa and rubber, but not for coffee, tea and CPO, showed an increase compared to the preceding periods. The indirect protection, in general indicated an increase, however, the direct protection showed a decrease. In total, the rate protection of the estate crops resulted in positive values eventhough it seemed to decrease from time to time. Terms of trade of estate crops against the importing sugar, from 1979 to 1997 showed a decrease but they were still in positive values. The decreasing performance of main estate crops would be more significant with respect to the capacity to import. In the future, it is suggested that the government of Indonesia should adjust its interventions continuously by taking into account the international price movements of main estate crops to give incentives to producers and exporters.

Key words: *impact of government intervention, riil price, rate of protection, price decomposition*

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada dampak dari kebijakan pemerintah di bidang produksi, perdagangan dan makro ekonomi terhadap harga riil, tingkat proteksi dan kinerja komoditas utama perkebunan, yaitu kakao, kopi, karet, teh, dan minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar domestik. Metode analisis yang digunakan adalah dekomposisi harga komoditas utama perkebunan di pasar domestik dan perhitungan tingkat proteksi langsung, tak langsung dan total keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga riil komoditas perkebunan pada periode 1985-1997 menunjukkan penurunan dibandingkan pada periode 1979-1985. Pada periode 1997-2005, harga riil

DAMPAK INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA EKONOMI KOMODITAS PERKEBUNAN UTAMA PADA BERBAGAI REJIM NILAI TUKAR RUPIAH *Bambang Dradjat*

kakao dan karet menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, hal ini tidak terjadi untuk kopi, teh dan minyak kelapa sawit. Secara umum, tingkat proteksi tidak langsung menunjukkan kenaikan, sebaliknya tingkat proteksi langsung mengalami penurunan. Secara total, tingkat proteksi masih positif walaupun mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Nilai tukar perdagangan komoditas utama perkebunan terhadap komoditi impor, sebagai contoh gula, dari tahun 1979 ke 1997 mengalami penurunan tetapi masih bernilai positif. Penurunan kinerja ini lebih nyata jika dilihat dari kapasitas untuk mengimpor. Pada masa mendatang pemerintah Indonesia sebaiknya menyesuaikan intervensinya secara terus menerus. Pergerakan harga internasional komoditas utama perkebunan perlu diperhitungkan sehingga intervensi tersebut dapat menghasilkan insentif bagi produsen dan pengeksportur untuk memproduksi dan mengeksportur.

Kata kunci: *dampak intervensi pemerintah, harga riil, tingkat proteksi, dekomposisi harga*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia merupakan perekonomian yang terbuka, sehingga perdagangan luar negeri memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengeksportur penting untuk komoditas-komoditas perkebunan, kehutanan, dan perikanan, tetapi juga dikenal sebagai salah satu negara pengimpor komoditas pangan yang cukup besar di dunia. Indonesia dikenal sebagai produsen utama komoditas dari tanaman tropis, yaitu tanaman perkebunan seperti karet, kopi, kelapa sawit, kelapa, dan lain-lainnya yang sebagian besar dieksportur. Selain komoditas ekspor, Indonesia juga penghasil tanaman pangan, seperti beras, jagung, kedelai, dan gula yang sebagian diantaranya diimpor.

Sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor utama dalam perekonomian Indonesia dan ke depan akan terus menjadi sektor penting dalam hal pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja, pendapatan nasional, penerimaan ekspor, dan keterkaitan dengan sektor industri dan jasa. Dengan perannya tersebut, sektor pertanian di Indonesia selalu menjadi perhatian pemerintah. Salah satu perhatian yang diberikan adalah pemerintah menerapkan kebijakan intervensi langsung dan tak langsung terhadap subsektor perkebunan dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan di bidang produksi, perdagangan dan makroekonomi untuk memberi insentif dan perlindungan terhadap subsektor perkebunan.

Pengaruh kebijakan pemerintah baik langsung maupun tak langsung terhadap suatu sektor (subsektor) sangat penting untuk diketahui. Pengetahuan tentang nilai-nilai proteksi langsung, tak langsung dan total terhadap suatu komoditas di suatu sektor (subsektor) akan memberikan gambaran apakah intervensi tersebut menguntungkan atau merugikan perkembangan komoditas yang dianalisis. Evaluasi dampak dari intervensi langsung dan tak langsung dari berbagai kebijakan produksi, perdagangan dan makroekonomi terhadap

komoditas perkebunan di pasar domestik dapat dilakukan dengan menganalisis perkembangan tingkat harga riil, nilai proteksi langsung, tak langsung, dan total.

Beberapa kebijakan produksi, perdagangan, dan makro ekonomi yang diperkirakan berpengaruh langsung adalah kebijakan produksi berupa perluasan areal perkebunan yang menyediakan subsidi paket input (pupuk, obat-obatan, upah tenaga kerja, dan bunga kredit) dan pembatasan output; kebijakan perdagangan berupa hambatan impor (tarif impor), ekspor (pajak ekspor) dan stabilisasi harga; dan kebijakan makro ekonomi berupa pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah/retribusi. Sedangkan kebijakan yang tidak berpengaruh langsung adalah kebijakan makro ekonomi berupa nilai tukar Rupiah.

Secara teoritis, elaborasi pengaruh kebijakan langsung terhadap harga komoditas telah dilakukan oleh beberapa ahli, seperti Tisdell (1988) untuk subsidi input dan stabilisasi harga, Tomek dan Robinson (1987) untuk pembatasan output, Houck (1986), Tomek dan Robinson (1987) dan Suranovic (2004a dan 2004b) untuk pajak impor, Houck (1986) dan Suranovic (2004c dan 2004d) untuk pajak ekspor, Just *et al.* (1982) dan Mangkoesobroto (1997) untuk pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan elaborasi pengaruh kebijakan tak langsung, yaitu nilai tukar mata uang, dilakukan oleh Houck (1986) dan Tomek dan Robinson (1987).

Studi kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis (i) profil harga riil dan perkiraan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan intervensi langsung dan tak langsung terhadap harga riil komoditas perkebunan (kakao, kopi, teh, karet, dan minyak sawit) di pasar domestik pada berbagai rezim kebijakan nilai tukar Rupiah, dan (ii) dampak berbagai kebijakan produksi, perdagangan di makroekonomi terhadap tingkat proteksi langsung, tak langsung, dan total, serta nilai tukar perdagangan dan kapasitas impor komoditas utama perkebunan.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Menurut The World Bank (1992) intervensi langsung diartikan sebagai suatu kebijakan yang mempengaruhi suatu sektor (pertanian) khususnya yang langsung mempengaruhi harga komoditas (pertanian), baik di pasar domestik maupun di pasar internasional, termasuk harga batas dan menciptakan perbedaan harga diantara harga produsen, konsumen, dan harga batas. Dengan pengertian di atas, maka pemerintah dapat mempengaruhi harga komoditas perkebunan secara langsung diantaranya melalui kebijakan produksi dan perdagangan dan secara tidak langsung melalui kebijakan makroekonomi. Intervensi tidak langsung ini mempengaruhi harga riil komoditas perkebunan melalui mekanisme dampak kebijakan makroekonomi terhadap nilai tukar perdagangan. Intervensi langsung dan tak langsung ini mempengaruhi insentif

produksi dengan menjadikan subsektor perkebunan lebih atau kurang menarik dibandingkan subsektor lain dalam perekonomian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis kebijakan produksi dan perdagangan sesuai periode kebijakan nilai tukar Rupiah.

Kebijakan produksi dan perdagangan komoditas perkebunan merupakan bagian dari kebijakan produksi dan perdagangan komoditas pertanian. Beberapa tujuan yang berkaitan dengan kebijakan produksi dan perdagangan komoditas perkebunan diantaranya adalah melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh tidak menguntungkan dari produksi dan perdagangan internasional, melindungi kepentingan industri di dalam negeri, melindungi lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Kebijakan produksi dibedakan antara kebijakan yang mempengaruhi input dan output. Kebijakan perdagangan dibedakan antara kebijakan perdagangan di dalam negeri dan di luar negeri. Kebijakan perdagangan dalam penelitian ini berkonsentrasi pada yang kedua dengan perhatian khusus pada kebijakan yang menghambat ekspor dan impor suatu produk melalui pajak ekspor dan impor. Tujuan dari penerapan kedua instrumen tersebut adalah untuk mencegah/membatasi ekspor atau impor produk tertentu, disamping meningkatkan pendapatan negara.

Analisis yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana harga riil produk akan menyesuaikan diri terhadap pencabutan insentif yang muncul dari kebijakan sektoral khusus dan keseluruhan atau kebijakan ekonomi makro. Untuk keperluan analisis ini dibedakan antara intervensi pemerintah yang mempengaruhi harga riil produk pertanian (i) secara langsung, yaitu kebijakan-kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk sektor pertanian dan (ii) secara tidak langsung, yaitu kebijakan-kebijakan di sektor produksi lain, khususnya kebijakan ekonomi makro yang mempengaruhi harga riil produk pertanian melalui nilai tukar Rupiah riil.

Metode Analisis

Pengelompokan Kebijakan dalam Tiga Rezim Nilai Tukar Rupiah

Rezim kebijakan nilai tukar Rupiah dibedakan antara nilai tukar tetap 1972-1985, nilai tukar mengambang terkendali 1985-1997 dan nilai tukar mengambang bebas 1997-sekarang (Kadir, 1997). Berbagai kebijakan langsung seperti diuraikan di atas dapat dikelompokkan berdasarkan rezim kebijakan nilai tukar Rupiah tersebut (tabel 1). Pengelompokan kebijakan dimaksud tidak dapat dipisahkan secara tegas menurut tahun karena masa berlakunya intervensi kebijakan dengan kebijakan nilai tukar Rupiah dapat tumpang tindih. Kebijakan subsidi, pajak penjualan dan pajak impor merupakan tiga kebijakan yang berjalan dari masa kebijakan nilai tukar tetap hingga nilai tukar mengambang bebas. Kebijakan pajak ekspor dan nilai tambah berada pada rezim kebijakan nilai tukar mengambang terkendali dan nilai tukar mengambang bebas.

Tabel 1. Kelompok Kebijakan Intervensi Menurut Rezim Nilai Tukar Rupiah

No	Rezim Nilai Tukar Rupiah	Kebijakan Intervensi
1.	Nilai tukar tetap 1972-1985	Subsidi input, pajak impor, pajak penjualan
2.	Nilai tukar mengambang terkendali 1985-1997	Subsidi input, pajak impor, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, pengendalian harga
3.	Nilai tukar mengambang bebas 1997-sekarang	Subsidi input, pajak impor, pajak ekspor, pertambahan nilai, pembatasan output, retribusi

Analisis Harga Domestik dan Ekspor

Data harga komoditas perkebunan yang dikumpulkan dinilai secara riil. Untuk keperluan analisis ini dibedakan antara intervensi pemerintah yang mempengaruhi harga riil produk pertanian (i) secara langsung, yaitu kebijakan-kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk komoditas di sektor pertanian dan (ii) secara tidak langsung, yaitu kebijakan ekonomi makro (nilai tukar Rupiah) yang mempengaruhi harga riil produk pertanian melalui nilai tukar Rupiah riil. Harga domestik (P_1) dan ekspor (P_2) riil dari suatu produk dihitung dengan menggunakan formula :

$$P_1 = P_a/CPI \text{ dan } P_2 = P_b/WPXI \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

P_a = Harga nominal domestik komoditas perkebunan tahun 1980 – 2005 (dalam rupiah) (Lampiran 1)

P_b = Harga nominal ekspor komoditas perkebunan tahun 1980 – 2005 (dalam US\$) (Lampiran 2)

CPI = Indeks harga konsumen (Tahun 1983 = 100)

WPXI = Indeks harga ekspor pada tingkat perdagangan besar (Tahun 1983 = 100)

Analisis Dekomposisi Harga Riil Produk

Dengan notasi P_t , harga domestik dalam Rupiah dari suatu produk-i pada tahun-t, dan notasi P_t^* untuk internasional suatu produk-i pada tahun-t dalam US\$, maka sesuai definisi (Bautista *et al.*, 1996):

$$P_t = P_t^* E_t T_t (1+m_t) \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

E = Nilai tukar Rupiah nominal (Rp/US\$)

T = Koefisien proteksi nominal, yaitu tarif impor implisit suatu produk-i yang diimpor, $T = 1+t_m^0$ atau untuk suatu produk-i yang diekspor $T = 1-t_x^0$, atau $T=1+s^0$ untuk suatu produk-i yang disubsidi

m = Marjin pemasaran antara harga ekspor dan harga domestik

Selanjutnya harga yang berpengaruh terhadap perilaku produsen adalah harga riil, dan bukan harga nominal. Harga riil dimaksud adalah harga domestik atau harga ekspor dibagi dengan indeks harga konsumen, yaitu $p_t = P_t^*/CPI$ (lampiran 1 dan lampiran 2), sehingga persamaan (2) dapat ditulis kembali menjadi : $p_t = P_t^* RER_t T_t (1 + m_t)$ (3a)

$$RER = (E CPI_{US})/CPI \dots\dots\dots (3b)$$

dimana:

$$p_t^* = P_t^*/CPI_{US}$$

$$RER_t = \text{Nilai tukar Rupiah riil, yaitu } E_t CPI_{US}/CPI_t$$

Persamaan (2) diubah dalam bentuk logaritma dan dilakukan diferensial sehingga menjadi:

$$\begin{matrix} (a) & (b) & (c) & (d) \\ \delta \ln p_t = \delta \ln P_t^* + \delta \ln RER_t + \delta \ln T_t + \delta \ln (1+m_t) \dots\dots\dots (4) \end{matrix}$$

Persamaan (4) di atas menunjukkan bahwa perubahan riil harga domestik dapat didekomposisi ke dalam empat komponen, yaitu: (a) perubahan harga ekspor (b) perubahan nilai tukar Rupiah riil (c) perubahan dalam proteksi nominal langsung, dan (d) perubahan dalam marjin pemasaran.

Perubahan dalam kebijakan pemerintah biasanya berhubungan dengan komponen (b) dan (c). Perubahan (4) ditentukan sepenuhnya oleh perubahan kebijakan harga dan perdagangan, sedangkan perubahan (b) ditentukan secara bersama oleh perubahan kebijakan ekonomi makro dan faktor eksogen. Selain itu, komponen (d) sedikit banyak ditentukan juga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah karena biaya transport antara daerah produsen atau pusat perdagangan dan pelabuhan merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah dan subsidi bahan bakar. Komponen (a) tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah karena Indonesia merupakan negara kecil dalam perdagangan produk-i di pasar internasional.

Dalam penelitian ini marjin (m_t) diasumsikan bersifat konstan (Quiroz dan Valdes, 1993 dalam Bautista *et al.*, 1996), sehingga variabel proteksi nominal T_t dapat diinterpretasikan mencakup pengaruh harga produsen yang muncul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang menentukan biaya transpor dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pergerakan produk-i dari daerah produsen atau pusat perdagangan ke pelabuhan. Dalam kasus ini, menghubungkan komponen (3) dari persamaan (3) dengan intervensi pemerintah secara langsung masih beralasan. Selanjutnya, komponen (d) dianggap sama dengan nol.

Pergerakan nilai tukar Rupiah riil disebabkan oleh pergerakan nilai tukar Rupiah nominal, harga internasional dan harga domestik. Karena harga domestik dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar Rupiah nominal (sebagai akibat dari kebijakan fiskal dan moneter), maka tidak ada hubungan korespondensi satu-satu antara nilai tukar Rupiah riil dan nominal. Spesifikasi persamaan nilai tukar Rupiah riil untuk Indonesia dipersentasikan sebagai:

$$\ln RER = f(\ln TOT, CA, \ln TRP, \delta \ln E, D_1, D_2, \dots, X_i) \dots \dots \dots (5)$$

dimana:

- TOT = *Terms of Trade* = Indeks rasio harga ekspor dan impor
- CA = *Current Account* = Neraca CA diekspresikan sebagai CA/GDP dalam %. CA dalam penelitian ini menunjuk pada neraca CA sebelum adanya transfer resmi.
- TRP = Dalam penelitian ini indeks rasio nilai impor dan ekspor digunakan sebagai proksi kebijakan perdagangan.
- Xi = Faktor lain yang diperkirakan berpengaruh, **seperti inflasi dan bunga.**
- D_i = Dummy perubahan struktural rezim kebijakan nilai tukar Rupiah.
- D1 = 1 tahun 1979-1985 dan D1 = 0 untuk lainnya.
- D2 = 1 untuk 1985-1997 dan D2 = 0 untuk lainnya.

Dalam penelitian ini, faktor lain tidak dimasukkan dalam persamaan seperti yang dilakukan oleh Bautista (1996). Secara struktural, perubahan nilai tukar Rupiah riil dipengaruhi oleh empat peubah, yaitu:

- (i) Nisbah harga ekspor dan impor dengan dugaan pengaruh positif (Bautista, 1985).
- (ii) *Current account* (CA) dengan dugaan pengaruh negatif.
- (iii) Kebijakan perdagangan, khususnya penerapan kuota impor atau tarif (dan subsidi ekspor) menaikkan harga domestik untuk produk yang diimpor (diekspor) berpengaruh negatif terhadap nilai tukar riil rupiah.
- (iv) Nilai tukar mata uang nominal dapat berpengaruh positif atau negatif tergantung jangka waktu penerapannya.

Persamaan (5) di atas diestimasi dengan menggunakan data serial waktu dari tahun 1980 hingga tahun 2005 dengan metode OLS. Berbagai teknik akan diterapkan untuk menghindari terjadinya auto korelasi dan *simultaneity bias* dari persamaan yang diestimasi sehingga dihasilkan persamaan dugaan yang terbaik.

Harga domestik riil dari suatu produk yang diperdagangkan dibawah situasi rezim perdagangan bebas (sektoral dan keseluruhan) didefinisikan sebagai:

$$P1 = Pa/CPI \text{ dan } P2 = Pb/CPI \dots\dots\dots (6)$$

dimana:

- Pa = Harga nominal domestik (dalam rupiah)
- Pb = Harga batas (border price) dinilai dalam Rupiah pada nilai tukar Rupiah resmi pemerintah, E
- CPI = Indeks harga konsumen

Menurut definisi, tingkat proteksi langsung (*Direct Protection Rate*) adalah proporsi dari selisih antara harga produsen aktual dan harga batas dalam Rupiah pada tingkat nilai tukar Rupiah resmi pemerintah, yaitu:

$$DPR = (P1 - P2)/P2 \dots\dots\dots (7)$$

Jika *Direct Protection Rate* (DPR), yaitu intervensi langsung pemerintah positif, maka proteksi langsung tersebut bersifat melindungi produk yang diproteksi. Namun, jika DPR negatif maka intervensi langsung tersebut bersifat "disproteksi" atau membebani.

Harga domestik riil produk pertanian yang diperdagangkan secara internasional dipengaruhi tidak hanya oleh kebijakan-kebijakan sektor pertanian, tetapi juga kebijakan-kebijakan perdagangan dan keseluruhan sektor yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah riil. Harga riil di bawah rezim perdagangan bebas diseluruh sektor dapat direpresentasikan sebagai:

$$P3 = Pb^*/CPI^* \dots\dots\dots (8)$$

dimana:

- Pb* = Harga batas (border price) pada nilai tukar Rupiah keseimbangan, E*
- CPI* = Indeks harga konsumen dengan komponen produk yang diperdagangkan dihitung pada nilai tukar Rupiah keseimbangan.

Keseimbangan nilai tukar Rupiah didefinisikan sebagai nilai tukar Rupiah yang akan terjadi pada keseimbangan CA dan tidak ada pembatasan devisa, seperti dikutip dari definisi Krueger, et.al (1988) oleh Bautista, etal (1996). Untuk menduga keseimbangan nilai tukar Rupiah riil RER* digunakan persamaan (5) dengan menerapkan persyaratan yang diperlukan, yaitu CA seimbang dan tidak terdapat restriksi perdagangan (tm_0 dan $tx_0 = 0$), yaitu menetapkan variabel CA dan $\ln TPR = 0$. Selanjutnya, distorsi nilai tukar Rupiah RERD dapat diestimasi sebagai berikut:

$$RERD = (RER - RER^*)/RER^* = IPR \dots\dots\dots (9a)$$

atau $RERD = (RER/RER^* - 1) = P_2/P_3 - 1 = IPR \dots\dots\dots (9b)$

atau $RERD = RER/RER^* = IPR + 1 \dots\dots\dots (9c)$

Nilai RER/RER^* diperoleh dari persamaan (5), yaitu dengan cara mensubstitusi nilai-nilai peubah bebas (TRP dan CA) untuk memperoleh nilai $\ln (RER/RER^*)$. Antilog dari $\ln (RER/RER^*)$ merupakan nilai RER/RER^* . RERD

atau IPR diperoleh dengan menggunakan persamaan (9b) yaitu $(RER/RER^* - 1) * 100$. Sebagai catatan, IPR adalah sama dengan RERD karena $P_2/P_3 = RER/RER^*$. Jika nilai Indirect Protection Rate (IPR) negatif berarti ada indikasi imbas kebijakan ekonomi makro, yaitu nilai tukar Rupiah riil over valued, yang berarti produsen domestik dari produk yang diperdagangkan menerima beban secara tidak langsung.

Menurut definisi, $RER^* = E * WPIUS/CPI^*$ dan $RER = E * WPIUS/CPI$. Sedangkan Nilai Proteksi Total (*Total Protection Rate* = TPR) didefinisikan sebagai proporsi selisih harga aktual dan harga batas pada nilai tukar Rupiah keseimbangan. Pengembangan formula perhitungan TPR yang mengakomodir interaksi antara DPR dan IPR ini sebagai hasil dari pemikiran pembahas (Dr. Ir. Pantjar Simatupang, MS. APU) pada penyajian proposal di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, tanggal 3 Januari 2006. TPR dapat direpresentasikan sebagai:

$$TPR = \frac{P_1 - P_3}{P_3} \dots\dots\dots (10)$$

$$TPR = \frac{P_1 - P_2 + P_2 - P_3}{P_3} \dots\dots\dots (11)$$

$$TPR = \frac{(P_2)(P_1 - P_2)}{P_3 P_2} + \frac{(P_2 - P_3)}{P_3} \dots\dots\dots (12)$$

$$TPR = \frac{(P_2)}{(P_3)} \frac{(P_1 - P_2)}{P_2} + \frac{P_2}{P_3} - 1 \text{ (lihat persamaan 9b)}$$

$$TPR = \frac{RER}{RER^*} DPR + IPR \text{ (lihat persamaan 9c)}$$

$$TPR = (IPR + 1)DPR + IPR \dots\dots\dots (13)$$

$$TPR = DPR + IPR + DPR * IPR \dots\dots\dots (14)$$

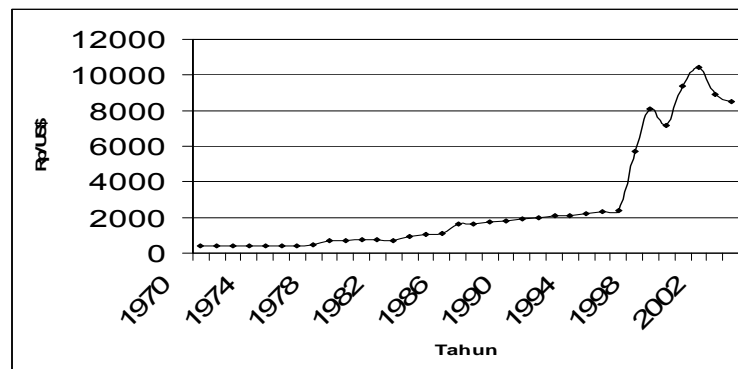
Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan meliputi data dari tahun 1979 hingga tahun 2005 yang meliputi harga ekspor komoditas perkebunan utama (karet, minyak sawit, kopi, kakao, dan teh), harga domestik komoditas perkebunan utama (karet, minyak sawit, kopi, kakao, dan teh), nilai tukar Rupiah, dan indeks harga konsumen. Sumber data terutama dari Indikator Ekonomi (Badan Pusat Statistik), Statistik Keuangan (Bank Indonesia), dan International Financial Statistics dari (International Monetary Fund/IMF) dalam beberapa tahun terbit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap US\$ menunjukkan kecenderungan yang naik dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan dianutnya rezim kebijakan nilai tukar Rupiah tetap, mengambang terkendali dan bebas. Setelah dilepasnya rezim nilai tukar Rupiah tetap, Rupiah mengalami depresiasi dari waktu ke waktu (gambar 1). Depresiasi ini tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi komoditas perkebunan yang berorientasi ekspor. Harga komoditas perkebunan dinilai murah oleh pembeli di luar negeri sehingga permintaan terdorong naik. Di sisi lain, harga komoditas perkebunan tersebut apabila dinilai dalam Rupiah menjadi lebih tinggi, walaupun pada kasus rezim nilai tukar Rupiah tetap keuntungan ini hanya sesaat. Pada sisi lain, harga domestik komoditas perkebunan mengalami kenaikan karena pergerakan harga domestik komoditas perkebunan pada umumnya mengikuti pergerakan harga ekspor.



Gambar 1. Pergerakan Nilai Tukar Nominal Rupiah terhadap US\$

Secara hipotesis dapat dinyatakan bahwa nilai tukar Rupiah ini diperkirakan dapat mengimbangi tekanan harga domestik sebagai akibat dari penerapan kebijakan intervensi langsung pemerintah yang berpotensi menekan harga komoditas perkebunan di pasar domestik. Sebagai contoh, pada saat harga internasional minyak sawit tertekan, walaupun harga domestik ikut tertekan, tingkat harga domestik ini riil tetap tinggi.

Perubahan Harga Riil

Harga Domestik

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada periode 1985-1997 harga komoditas perkebunan di pasar domestik melemah (tabel 2). Penurunan harga ini sangat mungkin terkait dengan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah yang

memberikan insentif secara riil lebih besar ke barang-barang *nontradable* dan nonperkebunan. Pada periode ini dibandingkan periode sebelumnya, harga barang *nontradable* dan nonperkebunan secara riil menjadi lebih murah dibandingkan harga komoditas perkebunan. Pada periode ini teh dan minyak sawit mengalami penurunan harga terbesar dibandingkan komoditas lainnya.

Pada periode selanjutnya (1997-2005), kakao dan karet mengalami perbaikan harga, baik terhadap periode 1979-1985 maupun 1985-1997, tetapi kopi, teh, dan CPO sebaliknya. Seiring dengan depresiasi nilai tukar Rupiah dan pengembangan industri hilirnya, kakao menikmati kenaikan harga terbesar. Secara riil, periode 1997-2005 juga lebih kompetitif bagi komoditas perkebunan dibandingkan periode 1985-1997, kecuali untuk kopi.

Tabel 2. Harga Domestik Riil Rata-rata Komoditas Perkebunan pada Periode 1979-1985 s/d 1997-2005 (1979-1985 =100)

Periode	Kakao	Kopi	Karet	Teh	CPO
1979-1985	100	100	100	100	100
1985-1997	94.15	97.32	108.66	79.66	71.79
1997-2005	158.22	92.40	121.79	98.35	95.66
Perubahan 1985-1997 terhadap 1979-1985	-5.85	-2.68	8.66	-20.34	-28.21
Perubahan 1997-2005 terhadap 1979-1985	58.22	-7.60	21.79	-1.65	-4.34
Perubahan 1997-2005 terhadap 1985-1997	64.06	-4.93	13.13	18.69	23.88

Sumber : Lampiran 1, diolah.

Pada periode tahun 1985-1997 terhadap tahun 1979-1985, penurunan harga domestik komoditas perkebunan, kecuali karet, terkait dengan penurunan harga komoditas perkebunan di pasar internasional. Depresiasi nilai tukar Rupiah dan kebijakan komoditas tidak cukup kuat mengatasi penurunan harga internasional. Khusus untuk teh dan kelapa sawit, kebijakan komoditas pada waktu itu sangat mungkin tidak memberikan proteksi bahkan bersifat disproteksi.

Masih pada tabel 2, pada periode tahun 1997-2005 terhadap tahun 1979-1985, harga domestik semua komoditas mengalami perbaikan, kecuali kopi. Penurunan harga ekspor tidak sampai menurunkan harga domestik karena depresiasi nilai tukar Rupiah dan kebijakan komoditas mampu mengatasi masalah tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk kopi yang secara terus menerus mengalami penurunan harga ekspor.

Harga Ekspor

Seperti pada harga domestik, hasil analisis menunjukkan bahwa pada periode 1985-1997 harga ekspor komoditas perkebunan dalam hal ini di pasar

internsional melemah dibanding tahun 1979-1985. Pada periode selanjutnya (1997-2005), kakao dan CPO mengalami perbaikan daya saing, baik terhadap periode 1979-1985 maupun 1985-1997, tetapi kopi, teh dan karet sebaliknya (tabel 3). Berbagai argumen terkait dengan perubahan harga ekspor ini sejalan dengan argumen pada penurunan harga domestik.

Tabel 3. Harga Ekspor Riil Rata-rata Komoditas Perkebunan pada Periode 1979-1985 s/d 1997-2005 (1979-1985 =100)

Periode	Kakao	Kopi	Karet	Teh	CPO
1979-1985	100	100	100	100	100
1985-1997	69,48	86,20	94,61	77,06	83,17
Perubahan 1985-1997 terhadap 1979-1985	-30,52	-13,80	-5,39	-22,94	-16,83
1997-2005	72,85	54,09	86,17	65,96	84,06
Perubahan 1997-2005 terhadap 1979-1985	-27,15	-45,91	-13,83	-34,04	-15,94
Perubahan 1997-2005 terhadap 1985-1997	3,38	-32,12	-8,44	-11,10	0,89

Sumber: Lampiran 2, diolah.

Perubahan Nilai Tukar Riil

Selama periode tahun 1979 hingga tahun 2005, nilai tukar riil menunjukkan tanda positif yang berarti terjadi depresiasi nilai tukar riil (tabel 4). Seperti dijelaskan sebelumnya, depresiasi nilai tukar riil ini mempunyai kontribusi positif dalam mengimbangi penurunan harga ekspor riil ke harga domestik riil.

Tabel 4. Nilai Tukar Riil Rata-rata pada Periode 1979-1985 s/d 1997-2005 (1979-1985 =100)

Periode	Nilai Tukar Riil
1979-1985	100,00
1985-1997	107,62
Perubahan 1985-1997 terhadap 1979-1985	7,62
1997-2005	117,07
Perubahan 1997-2005 terhadap 1979-1985	17,07
Perubahan 1997-2005 terhadap 1985-1997	9,45

Sumber: Lampiran 3, diolah.

Analisis Dekomposisi Harga

Nilai tukar Rupiah berperan dalam menentukan tingkat proteksi tidak langsung oleh pemerintah terhadap komoditas perkebunan. Hasil pendugaan

menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel-variabel *terms of trade* (TOT), kebijakan perdagangan (TRP), perubahan nilai tukar Rupiah dan perubahan struktural rezim kebijakan nilai tukar Rupiah (D1 = 1 tahun 1979-1985 dan D1 = 0 untuk 1986-2005 dan D2 = 1 untuk 1985-1997 dan D2 = 0 untuk lainnya). Secara struktural persamaan dugaan nilai tukar Rupiah tersebut adalah :

$$L_RER = 8.189641 - 0.220897 L_TOT + 0.019292 CA + 0.138551 L_TRP + \\ (45.603) \quad (-1.985) \quad (1.706) \quad (3.087) \\ 0.476106 DL_ER - 0.771475 D1 - 0.504702 D2 \\ (4.426) \quad (-4.829) \quad (-4.046)$$

$$Adj\ R-sq = 0.9493 \quad Rho = 0,30$$

Hasil pendugaan di atas mengindikasikan bahwa kenaikan *terms of trade* menimbulkan apresiasi nilai tukar Rupiah. Sedangkan kenaikan transaksi berjalan dan kebijakan perdagangan mendorong terjadinya depresiasi nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah nominal berpengaruh nyata terhadap depresiasi nilai tukar Rupiah riil dalam jangka pendek. Kenaikan rasio nilai impor terhadap ekspor yang positif mengindikasikan terdapat *over valued* nilai tukar Rupiah terhadap \$ Amerika. Dalam kondisi ini nilai impor tertekan tetapi nilai ekspor naik dan kenaikan nilai ekspor ini melebihi penurunan nilai impor. Selanjutnya rupiah mengalami apresiasi (tanda positif). Sekitar 47 persen apresiasi nilai tukar Rupiah nominal diteruskan ke apresiasi nilai tukar Rupiah riil dalam satu tahun.

Selanjutnya, hasil analisis dekomposisi menunjukkan bahwa tingkat proteksi langsung dan nilai tukar Rupiah mempunyai kecenderungan yang bervariasi dalam mengkompensasi penurunan harga ekspor komoditas perkebunan (tabel 5). Pada perubahan harga tahun 1985-1997 terhadap tahun 1979-1985, hanya pada karet penurunan harga ekspor dapat dikompensasi perubahan nilai tukar Rupiah dan tingkat proteksi langsung. Pada perubahan harga tahun 1997-2005 terhadap tahun 1979-1985, penurunan harga ekspor kopi, teh dan CPO tidak dapat diimbangi perubahan nilai tukar Rupiah dan tingkat proteksi langsung, sedangkan pada komoditas lain dapat dikompensasi. Kasus pada kopi ini juga terjadi pada perubahan harga tahun 1997-2005 terhadap tahun 1985-1997, sedangkan pada komoditas lain dapat dikompensasi.

Pada tiga periode analisis, hanya pada karet tingkat proteksi dan perubahan nilai tukar Rupiah yang mampu mengkompensasi penurunan harga ekspor. Pada kopi bahkan sama sekali tidak terjadi kompensasi. Pada kakao, teh dan CPO tingkat kompensasi semakin meningkat dari periode ke periode.

Tingkat Proteksi

Hasil perhitungan tingkat proteksi terhadap komoditas utama perkebunan menunjukkan bahwa tingkat proteksi tidak langsung menunjukkan

tren yang positif bagi komoditas perkebunan. Namun, proteksi langsung pada umumnya menunjukkan nilai negatif. Artinya, proteksi langsung bias ke komoditas *nontradable* dan nonperkebunan. Secara total, proteksi terhadap komoditas perkebunan bernilai positif walaupun cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya arus liberalisasi perdagangan (tabel 6).

Tabel 5. Dekomposisi Perubahan Rata-rata Harga Domestik, 1979 – 2005

Komoditas dan komponen dekomposisi	Perubahan 1985-1997	Perubahan 1997-2005	Perubahan 1997-2005
	terhadap 1979-1985	terhadap 1979-1985	terhadap 1985-1997
Perubahan harga domestik			
Kakao	-5,85	58,22	64,06
- Perubahan harga ekspor	-30,52	-27,15	3,38
- Perubahan nilai tukar Rupiah	7,62	17,07	9,45
- Perubahan tingkat proteksi	17,05	68,29	51,24
Kopi	-2,68	-7,60	-4,93
- Perubahan harga ekspor	-13,80	-45,91	-32,12
- Perubahan nilai tukar Rupiah	7,62	17,07	9,45
- Perubahan tingkat proteksi	3,50	21,24	17,74
Karet	8,66	21,79	13,13
- Perubahan harga ekspor	-5,39	-13,83	-8,44
- Perubahan nilai tukar Rupiah	7,62	17,07	9,45
- Perubahan tingkat proteksi	6,43	18,55	12,12
Teh	-20,34	-1,65	18,69
- Perubahan harga ekspor	-22,94	-34,04	-11,10
- Perubahan nilai tukar Rupiah	7,62	17,07	9,45
- Perubahan tingkat proteksi	-5,02	15,32	20,35
CPO	-28,21	-4,34	23,88
- Perubahan harga ekspor	-16,83	-15,94	0,89
- Perubahan nilai tukar Rupiah	7,62	17,07	9,45
- Perubahan tingkat proteksi	-19,00	-5,47	13,53

Nilai DPR pada umumnya cenderung negatif menunjukkan bahwa berbagai proteksi langsung bersifat disproteksi atau membebani. Namun nilai IPR yang cenderung positif menunjukkan bahwa produsen komoditas perkebunan Indonesia menerima insentif untuk meningkatkan produksi. Secara keseluruhan komoditas perkebunan masih memperoleh insentif berproduksi dari proteksi yang ditunjukkan dengan nilai positif.

Tabel 6. Tingkat Proteksi Langsung, Tak Langsung dan Total terhadap Komoditas Utama Perkebunan

Tahun	IPR	Kakao		Kopi		Karet		Teh		CPO	
		DPR	TPR	DPR	TPR	DPR	TPR	DPR	TPR	DPR	TPR
1979	7,20	-0,16	5,92	1,02	15,61	0,14	8,37	-0,11	6,28	0,38	10,33
1980	7,32	-0,50	3,19	0,15	8,54	-0,05	6,91	-0,32	4,64	0,09	8,03
1981	7,39	-0,48	3,37	0,03	7,65	-0,15	6,09	-0,46	3,53	0,02	7,53
1982	7,39	-0,30	4,85	0,71	13,32	0,09	8,11	-0,34	4,52	0,28	9,78
1983	7,37	-0,49	3,23	0,54	11,88	0,42	10,86	-0,42	3,90	0,56	12,09
1984	7,55	-0,51	3,20	0,45	11,40	-0,18	6,04	-0,31	4,90	0,85	14,78
1985	7,54	-0,52	3,10	4,76	48,18	0,04	7,91	-0,20	5,80	0,57	12,44
1986	7,73	-0,55	2,92	1,47	20,57	0,16	9,13	-0,32	4,94	0,21	9,60
1987	7,86	-0,42	4,14	1,42	20,43	0,35	10,93	-0,21	6,02	0,73	14,34
1988	7,67	-0,27	5,30	0,63	13,09	-0,09	6,89	-0,26	5,41	0,45	11,55
1989	7,67	-0,30	5,07	0,09	8,50	0,07	8,26	-0,37	4,48	0,29	10,19
1990	7,69	-0,36	4,52	-0,09	6,87	-0,07	7,07	-0,55	2,93	0,13	8,81
1991	7,72	-0,35	4,64	-0,13	6,55	-0,15	6,44	-0,49	3,48	0,10	8,56
1992	7,71	-0,33	4,84	-0,25	5,58	-0,20	5,94	-0,48	3,52	0,01	7,84
1993	7,71	-0,43	3,95	0,02	7,85	-0,17	6,26	-0,44	3,84	-0,05	7,29
1994	7,69	-0,02	7,55	0,94	15,84	0,06	8,21	-0,26	5,44	-0,16	6,30
1995	7,66	-0,17	6,15	0,74	14,07	0,36	10,78	-0,17	6,22	-0,28	5,26
1996	7,82	0,16	9,27	0,57	12,87	0,13	8,93	-0,25	5,63	-0,21	5,93
1997	7,83	-0,67	1,91	-0,30	5,14	-0,62	2,36	-0,77	0,99	-0,72	1,45
1998	8,21	-0,69	1,87	0,20	10,06	-0,39	4,60	-0,76	1,21	-0,66	2,16
1999	8,50	-0,50	3,75	0,78	15,96	-0,40	4,65	-0,69	1,98	-0,33	5,32
2000	8,35	-0,52	3,48	-0,29	5,66	-0,58	2,89	-0,80	0,85	-0,53	3,44
2001	8,50	-0,69	1,91	-0,59	2,94	-0,67	2,16	-0,82	0,70	-0,61	2,72
2002	8,46	-0,74	1,42	-0,69	1,90	-0,69	1,93	-0,72	1,66	-0,63	2,50
2003	8,33	-0,75	1,33	-0,76	1,29	-0,70	1,77	-0,67	2,07	-0,61	2,65
2004	8,38	-0,77	1,19	-0,83	0,57	-0,73	1,50	-0,36	4,97	-0,66	2,14
2005	8,46	-0,83	0,59	-0,77	1,17	-0,73	1,54	-0,48	3,95	-0,76	1,31

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perubahan harga riil komoditas perkebunan dari satu periode ke periode selanjutnya (1979-1985 ke 1985-1997 dan ke 1997-2005 dan 1985-1997 ke 1997-2005) menunjukkan bahwa kecuali kopi, harga riil komoditas perkebunan di pasar domestik mengalami peningkatan. Secara umum dapat disimpulkan

DAMPAK INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA EKONOMI KOMODITAS PERKEBUNAN UTAMA PADA BERBAGAI REJIM NILAI TUKAR RUPIAH Bambang Dradjat

bahwa depresiasi nilai tukar perdagangan dan kebijakan proteksi komoditas cenderung mampu mengatasi masalah penurunan harga internasional. Periode tahun 1997-2005, kecuali pada kopi, berbagai kebijakan komoditas memberi andil terhadap peningkatan harga riil (daya saing) komoditas perkebunan di pasar domestik.

Dampak berbagai kebijakan produksi, perdagangan di makroekonomi secara total cenderung memberi insentif atau perlindungan terhadap komoditas utama perkebunan. Disinsentif yang ditimbulkan dari adanya intervensi langsung ke komoditas selain komoditas utama perkebunan dikompensasi oleh insentif yang ditimbulkan dari intervensi tidak langsung berupa perubahan nilai tukar dari periode ke periode.

Saran

Dalam rangka mengembangkan subsektor perkebunan, pemerintah perlu memahami mekanisme dan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan baik yang berupa intervensi langsung maupun tak langsung terhadap subsektor dan komoditas perkebunan. Dampak yang perlu diketahui adalah pengaruhnya terhadap harga riil (daya saing) dan nilai tukar perdagangan dan kapasitas impor.

Intervensi langsung dan tak langsung di bidang produksi, perdagangan, dan makroekonomi perlu memperhitungkan kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap harga riil komoditas perkebunan. Intervensi langsung di bawah rezim *fixed exchange rate* 1972-1985 meliputi subsidi input, pajak impor, dan pajak penjualan. Intervensi langsung di bawah rezim nilai tukar mengambang terkendali 1985-1997 meliputi subsidi input, pajak impor, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, dan pengendalian harga. Sedangkan intervensi langsung di bawah rezim nilai tukar mengambang bebas 1997 hingga sekarang meliputi subsidi input, pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, pembatasan output, dan retribusi. Kebijakan nilai tukar Rupiah sendiri merupakan salah satu bentuk intervensi tak langsung.

Kebijakan langsung, seperti subsidi input, perlu lebih diintensifkan tetapi kebijakan langsung lainnya perlu lebih dilonggarkan. Kebijakan nilai tukar perdagangan mengambang yang diberlakukan saat ini perlu terus dilanjutkan sebagai instrumen proteksi bagi komoditas perkebunan secara tidak langsung. Hal ini diperlukan untuk meredam tekanan terhadap harga domestik komoditas perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

Bautista, Romeo M. 1985. Effects of Trade and Exchange Rate Policies on Export Production Incentives in Philippine Agriculture. *The Philippine Economic Journal*, No: 59, Vol 24 (2 & 3).

Jurnal Agro Ekonomi, Volume 27 No.1, Mei 2009 : 61 - 80

- Bautista, Romeo M, Nu Nu San, Hermanto, Dewa K. S. Swastika, and Syaiful Bahri. 1996. Evaluating the Effects of Domestic Policies and External Factors on the Price Competitiveness of Crops: Cassava, Soybean, Corn, and Sugarcane. Trade and Macroeconomics Division, International Food Policy Research Institute, Washington, USA. www.ifpri.org.
- Houck, James. P. 1986. Elements of Agricultural Trade Policies. Macmillan Publishing Company, New York.
- Just, E. R., D.L. Hueth, dan A. Schmitz. 1982. Applied Welfare Economics and Public Policy. Prentice Hall, Inc, New Jersey.
- Kadir, I. 1997. Implikasi Kebijakan Nilai Tukar Mengambang dalam Upaya Peningkatan Ekspor. Makalah Bidang Ekonomi Makro. Disampaikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXII, Jakarta.
- Krueger, A.O., M. Schiff, and A. Valdes. 1988. Agricultural Incentives in Developing Countries: Measuring the Effects of Sectoral and Economic-Wide Policies. World Bank Economic Review No. 2: 255-271.
- Mangkoesebroto, G. 1997. Ekonomi Publik. Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.
- Suranovic, S. 2004a. Welfare Effects of Tariff: Large Country. [Http: www.internationalecon.com](http://www.internationalecon.com)
- Suranovic, S. 2004b. Welfare Effects of Tariff: Small Country. [Http: www.internationalecon.com](http://www.internationalecon.com)
- Suranovic, S. 2004c. Welfare Effects of Export Tax: Large Country. [Http: www.internationalecon.com](http://www.internationalecon.com)
- Suranovic, S. 2004d. Welfare Effects of Export Tax: Large Country. [Http: www.Internationalecon.com](http://www.Internationalecon.com)
- The World Bank. 1992. The Political Economy of Agricultural Pricing Policy: A Synthesis of the Economics in Developing Countries. The World Bank, Washington, USA.
- Tisdell, C.A. 1988. Microeconomics of Market. John Wiley & Sons. Gladesville, New South Wales, Australia.
- Tomek, W. G and Robinson, K. L. 1987. Agricultural Product Prices. Cornell University Press, London.
- Widodo, S. T. 1990. Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius, Yogyakarta.

Lampiran 1. Harga Domestik Komoditas Perkebunan (Rp/kg)

Tahun	Kakao	Kopi	Karet	Teh	CPO
1979	13789	20757	11704	13021	6633
1980	9934	12531	10381	9360	5031
1981	6919	8464	6935	6093	4419
1982	6417	8888	5655	6381	3288
1983	7570	12500	11503	9271	4554
1984	9157	12001	6815	16077	6774
1985	8171	34588	6270	11025	4813
1986	8704	20432	9600	9501	2695
1987	8797	19822	11041	9724	4218
1988	8744	16069	9000	9000	5101
1989	7847	9863	9618	8940	4028
1990	7788	8169	8383	8471	3234
1991	7755	7954	7843	7744	3656
1992	7084	7244	7643	7069	4112
1993	5934	9253	7594	7662	3846
1994	11156	18565	10156	7726	3466
1995	7982	18833	14725	7505	3117
1996	10082	15721	11255	6216	2900
1997	8290	11814	6469	4789	2160
1998	13174	22697	11498	11383	4862
1999	14953	30114	10039	9243	6676
2000	15828	18794	10997	8632	5152
2001	13622	10048	8068	8415	3872
2002	14948	8251	8354	11276	4745
2003	15864	8018	9720	12939	5466
2004	14986	8415	13357	11485	5745
2005	14370	12200	14299	11906	5002

Sumber: Badan Pusat Statistik (beberapa tahun penerbitan)

Lampiran 2. Harga Ekspor Riil Komoditas Perkebunan (US\$/ton)

Tahun	Kakao	Kopi	Karet	Teh	CPO
1979	2248,4	2231,1	1087,0	1556,3	569,5
1980	2157,7	2573,6	1193,8	1508,1	506,5
1981	1664,2	3115,0	1028,4	1415,1	544,6
1982	1335,0	1515,3	754,9	1405,8	370,9
1983	1657,0	1416,4	899,2	1755,0	322,4
1984	2117,6	1450,9	939,4	2642,0	416,4
1985	2031,4	938,4	717,3	1654,3	365,1
1986	1741,1	1865,7	742,3	1253,7	199,2
1987	1621,5	2858,3	876,9	1313,1	260,6
1988	1336,7	1791,2	1098,3	1352,0	391,5
1989	1123,7	1541,1	90,3	1418,7	312,9
1990	1068,3	1170,0	786,1	1631,3	249,5
1991	1032,4	990,8	791,6	1298,6	287,3
1992	902,5	1382,7	819,2	1162,0	346,0
1993	921,9	676,7	804,5	1217,1	357,0
1994	1208,6	1189,8	1021,7	1112,1	440,1
1995	1324,2	3239,5	1482,8	1233,4	590,8
1996	1158,2	1654,0	1337,2	1106,5	493,7
1997	1575,7	1899,2	1063,7	1329,0	487,3
1998	1502,1	1430,0	671,1	1684,2	503,8
1999	1008,1	1325,5	568,2	992,8	337,8
2000	806,1	957,1	644,1	1061,8	264,5
2001	992,8	751,5	540,9	1050,2	220,4
2002	1505,6	689,0	693,6	1032,4	330,4
2003	1745,8	799,9	899,3	1079,6	384,4
2004	1489,9	854,8	1163,1	1050,2	397,4
2005	1748,8	500,5	1.090,3	842,0	419,6

Sumber : International Monetary Fund (beberapa tahun penerbitan)

Lampiran 3. Nilai Tukar Riil Rupiah

Tahun	Nilai Tukar Riil
1979	6,63267
1980	6,75447
1981	6,70752
1982	6,61021
1983	6,80623
1984	6,92382
1985	6,96203
1986	7,30171
1987	7,25305
1988	7,26421
1989	7,28657
1990	7,32148
1991	7,31407
1992	7,31476
1993	7,27335
1994	7,25739
1995	7,23931
1996	7,22514
1997	7,71941
1998	7,8008
1999	7,89517
2000	8,15069
2001	8,16363
2002	7,89877
2003	7,86708
2004	7,92934
2005	7,91862

Sumber: Statistik Keuangan Bank Indonesia (beberapa tahun)